



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2025

JUDUL

"Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gerdunastaskin)"

Fokus Strategis

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Tim Ahli

Dr. I Nyoman Sudipa, ST.M.Si

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Tingkat kemiskinan di Kabupaten Klungkung dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami perkembangan yang semakin menurun sampai tahun 2020 sebesar 4,87%. Pasca pandemi Covid 19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan sebesar 5,64% pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 6,07% pada Tahun 2022. Sejalan dengan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,61%, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,3%. Penurunan persentase kemiskinan secara makro dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Target capaian penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh komitmen, kemampuan, program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Tentunya, perlu adanya dukungan baik dari sisi kebijakan ataupun pembiayaan dari Pemerintah pusat dengan tetap mengacu pada prinsip, strategi dan program dari pemerintah pusat, sehingga akan menjadi suatu keselarasan pemahaman dan langkah penanggulangan kemiskinan dalam mencapai target yang ditetapkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama dalam kebijakan, untuk itu diperlukan perumusan masalah yang komprehensif, salah satu upaya pemerintah adalah dengan menyusun dokumen strategis kebijakan di daerah yaitu melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara menjalankan penanggulangan kemiskinan oleh daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020 bahwasanya RPKD adalah dokumen strategis daerah yang digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPKD diperlukan

karena kompleksnya masalah kemiskinan tidak hanya dari segi rendahnya pendidikan. pendapatan tetapi adalah kombinasi antara karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah tangga (mikro) di daerah yang bersangkutan. hal seperti inilah yang membuat pentingnya RPKD sebagai cara untuk mengurangi persoalan kemiskinan yang kompleks agar menemukan solusinya secara cepat dan tepat.

Untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya tambahan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Dalam RPJMD kabupaten Klungkung Tahun 2025-2030 penurunan persentase penduduk miskin menjadi 3% dan ini membutuhkan kerja keras. Perlu dilakukan upaya baik keras baik secara makro melalui intervensi pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan laju inflasi, mengurangi pengangguran, intervensi terhadap pembiayaan kesehatan, peningkatan pendapatan per kapita, dan meningkatkan kapasitas PDRB. secara mikro dilakukan melalui intervensi program-program penanggulangan yang dilakukan secara sektoral. Upaya percepatan ini disebut Gerakan Teradu penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klungkung.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Klungkung melalui intervensi yang dilakukan secara terpadu, serentak dan berkelanjutan melalui program makro dan mikro dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (perangkat daerah, swasta dan masyarakat).

Tujuan :

1. Mengurangi persentase penduduk miskin
2. Meningkatkan kapasitas intervensi terhadap masyarakat miskin dalam menanggulangi kemiskinan
3. Melakukan evaluasi terhadap program penanggungan kemiskinan yang telah dilaksanakan
4. Menemu kenali masalah kemiskinan di lapangan dan menemukan cara menanggulangnya

II. Ide dan Gagasan

1. Melakukan identifikasi kemiskinan di Kabupaten secara detail dengan menggunakan data DTKS dan data Klungkung Dalam Genggaman.
2. Melakukan klasifikasi tingkat kemiskinan di masing-masing desa (Sangat Miskin, Hampir Miskin, Miskin, dan Rentan Miskin).
3. Menemukenali kenali masalah kemiskinan baik secara makro seperti keterbatasan sarana listrik, air bersih, infrastruktur jalan yang tidak bisa diakses oleh kelompok rentan/miskin dan secara mikro seperti pendidikan, penghasilan, akses kesehatan, kondisi rumah, dll untuk memudahkan intervensi penanggulangan kemiskinan.
4. Melakukan gerakan preventif dan kuratif dan menyusun rencana penanggulangan kemiskinan dan intervensi yang dilakukan.
5. Melakukan gerakan langsung ke lapangan

III. Rekomendasi

Program/atau kegiatan ini bisa dilakukan sebagai agenda penting yang dipayungi dengan

peraturan daerah atau peraturan bupati

Semarang, 08 Agustus 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-